



TERTUDUH KONSPIRASI KASUS CIK, TONSU DAN JACOB HENDRIK KLARIFIKASI

HALAMAN 2



Bertemu di Restoran Hanya Kebetulan, Sama-sama Mau Makan, tak Ada Urusan Kasus Gunung Ruang

ISU pertemuan antara mantan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Toni Supit dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) Jacob Hendrik Pattipeilohy jadi gunjingan public.

Sebeb, setelah keduanya bertemu, tak lama kemudian Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit (CIK) ditetapkan menjadi tersangka dugaan penyelewengan bantuan bencana erupsi Gunung Ruang. Kini, CIK dititip Kejati Sulut di Rutan Malendeng.

Retnang waktu pertemuan Toni Supit dan Jacob Hendrik yang tidak terlalu lama dengan penetapan CIK sebagai tersangka itulah yang memunculkan spekulasi, suami Evangelian Sasingen, juga mantan Bupati Sitaro, itu berada di balik penahanan CIK. Media sosial ribut berspekulasi mengenai dugaan kongkalikong tersebut. Agar tidak lebih melebar jauh, Toni Supit melakukan klarifikasi. Ia menjeskan duduk operkaranya hingga anggota DPRD Sulut dari PDIP itu bisa bertemu Kejati Jacob Hendrik. Klarifikasi dilakukan usai rapat dengar pendapat di DPRD Sulut, Senin (11/5).

Tonsu, sapaan akrab pengusaha perkapalan ini menegaskan pertemuan itu bukan agenda khusus. Atau pertemuan tertutup sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat. Ia mengatakan kehadirannya di lokasi pertemuan sekadar makan bersama rekan-rekannya. Ia bahkan tidak mengetahui kehadiran Kejati Sulut di tempat yang sama.

Menurut Tonsu, momen tersebut terjadi secara kebetulan. Ia juga tidak ada komunikasi khusus dengan Kejati. Posisi duduk mereka pun kata Tonsu, berjauhan dan ia baru tiba belakangan. "Pertemuan itu kebetulan. Itu sudah lama. Saya datang makan bersama teman, dan Bapak (Kajati) ada di situ. Saya tidak tahu Bapak ada di situ. Kita duduk berjauhan. Saya datang terakhir. Cuma makan, setelah itu pulang," kelitnya.

Ia menepis anggapan terjadi pembicaraan khusus yang berkaitan dengan persoalan hukum. Menurutnya, apabila ada agenda rahasia, tidak mungkin dilakukan di tempat umum yang dilihat banyak orang. "Tidak ada komunikasi apa-apa. Juga bukan

pertemuan rahasia. Kan itu tempat umum," katanya. Ia menduga isu tersebut diembuskan terkait dinamika politik masa lalu. Ia mengakui pernah berkompetisi dalam kontestasi politik sehingga muncul penilaian sebagian pihak yang menganggap masih ada persoalan lama terkait rivalitas politik. "Apakah ini cocok atau tidak, karena mungkin kita dulu pernah



Eri Yudianto

berkompetisi dalam politik waktu pencalonan, dan lantas dianggap masih ada sakit hati karena kalah, saya juga tidak tahu," ungkapnya.

Anggota DPRD Sulut dari Dapil Nusa Utara ini menegaskan dirinya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kejati Sulut juga telah memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas isu pertemuan tersebut. Pihak Kejati menegaskan tidak ada pembahasan ataupun intervensi terhadap penanganan perkara hukum, terutama terkait dugaan korupsi bantuan bencana Gunung Ruang yang menyeret nama Bupati Sitaro Chyntia Kalangit. Klarifikasi dari kedua pihak diharapkan dapat meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Di tengah perhatian publik terhadap proses hukum, transparansi dan keterbukaan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Kejati Ikut Membantah

Kejati Sulut turut merespon viralnya foto yang menampilkan pertemuan Kajati dengan mantan Bupati Sitaro di sebuah restoran. Karena foto itu dikaitkan dengan dugaan adanya intervensi terkait perkara yang sementara ditangani Korps Adhayaksa

di Nyiur Melambai. Asintel Eri Yudianto, menekankan pertemuan Kejati Sulut dengan Toni Supit terjadi di ruang terbuka dan disaksikan masyarakat umum.

"Ada suatu pemberitaan ya, terkait dengan pimpinan kami, Kajati. Yang terindikasi atau diinformasikan bertemu dengan seseorang



Pertemuan itu kebetulan. Itu sudah lama. Saya datang makan bersama teman, dan Bapak (Kajati) ada di situ. Saya tidak tahu Bapak ada di situ. Kita duduk berjauhan. Saya datang terakhir. Cuma makan, setelah itu pulang."



Ada suatu pemberitaan ya, terkait dengan pimpinan kami, Kajati. Yang terindikasi atau diinformasikan bertemu dengan seseorang pejabat atau partai, tokoh partai politik tertentu. Kami sampaikan bahwasanya foto yang di-share di media massa itu adalah foto lama ya. Tidak ada kaitannya dengan perkara ini."

pejabat atau partai, tokoh partai politik tertentu. Kami sampaikan bahwasanya foto yang di-share di media massa itu adalah foto lama ya. Tidak ada kaitannya dengan perkara ini," tegas Eri Yudianto. "Kedua, pimpinan kami bertemu di ruang terbuka, dan semua orang bisa mengakses. Bisa saya perlihatkan di sini ada pengunjung-pengunjung lainnya. Jadi tidak mungkinlah pertemuan itu membahas persoalan yang terkait perkara, apalagi yang sedang kita tangani," tegasnya lagi. "Jadi, bisa kami simpulkan ini apa... pengalihan isu ya. Bahwasanya penyidikan yang kita lakukan itu ada semacam by order. Tolong dicatat, itu tidak ada sama sekali," tutur Eri Yudianto.

Kajati seorang pejabat publik, siapapun yang bertemu dan itu hal yang wajar. "Apalagi di tempat umum. Semua bisa mengakses, bisa melihat, dan lain sebagainya. Begitu," tandasnya. **(gel/gnr/mpg/mpd)**





Mau Transaksi Cepat Tanpa Antre?

Install *TRING!* Sekarang!



Download Sekarang!

Mudah & Cepat

Pegadaian Call Center

1500 569

sahabat.pegadaian.co.id | www.pegadaian.co.id

PT Pegadaian berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

TRING!



Download sekarang!



OD Pimpin Banteng Moncong Putih ke Wisma Negara Bertemu Gubernur YS, Hasilnya: Baku Tongka!



GUBERNUR Yulius Selvanus menerima kunjungan jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang dipimpin Olly Dondokambey.

POLITIK di Sulawesi Utara (Sulut) itu dinamis. Juga kian dewasa. Buktingya, Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bertemu jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sulut, Senin (11/5) kemarin.

YS menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus banteng moncong putih di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin pagi. Rombongan partai merah itu datang lengkap, dipimpin langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, Olly Dondokambey, juga eks Gubernur Sulut, Wakil Ketua DPD Steven Kandouw, juga eks Wagub Sulut, Ketua DPRD Andi Silangen, Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo, para Bupati dan Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dari PDIP, Sekretaris dan Bendahara DPD, fungsionaris partai dan para kader.

Pertemuan berlangsung hangat. Olly

Dondokambey, yang juga Bendahara Umum (Bendum) DPP PDIP duduk berdsampingan dengan Gubernur sambil ngobrol akrab. Mereka tiba di Wisma Negara Bumber dengan membawa pesan kuat mengenai pentingnya komunikasi dua arah demi keberlanjutan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.

Gubernur YS yang tampil dengan atribut lengkap, menegaskan bahwa membangun daerah yang majemuk tidak bisa dilakukan dengan gaya single fighter. Ia menekankan filosofi "Baku Tongka" atau saling menopang sebagai fondasi utama pemerintahannya.

"Sulawesi Utara membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk partai politik. Saya sangat menghargai peran besar PDI Perjuangan dalam meletakkan fondasi pembangunan di daerah ini," ujar Gubernur. Ia berharap hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif yang didominasi kader PDI Perjuangan terus terjaga guna memastikan kebijakan publik berjalan tanpa hambatan.

Gayung bersambut, Olly Dondokambey

menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk dukungan moral sekaligus komitmen politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Gubernur Sulut dua periode ini menyatakan bahwa kepentingan rakyat harus berada di atas ego golongan.

"PDI Perjuangan siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kami berkomitmen memberikan masukan konstruktif agar Sulut mampu menjawab tantangan ekonomi global dan memperkuat posisi kita sebagai gerbang ekonomi Timur Indonesia," tegas Olly.

Pertemuan ini diyakini berefek sentimen positif bagi iklim investasi di Sulut. Bersatunya kekuatan politik besar dalam pemerintah daerah, program-program strategis nasional di Sulut diprediksi akan berjalan lebih akseleratif.

Pertemuan diakhiri dengan diskusi tertutup yang membahas berbagai poin pembangunan daerah. Juga mempertegas bahwa meskipun kontestasi politik telah usai, sinergi demi kesejahteraan rakyat tetap menjadi panglima tertinggi di Sulawesi Utara. (dth/dbs)

Kepala BPS Bitung Carlos Erickson Temui Kapolres Albert Zai

JELANG pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kota Bitung, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung, Carlos Erickson, menemui Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, Senin (11/05).

Menurut Carlos Erickson, kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan data statistik yang akurat dan terpercaya. "Selain itu untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus momentum koordinasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kota Bitung," ungkap Carlos.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat serta dukungan yang diberikan Kapolres Bitung. "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Bitung yang telah menerima kami dengan sangat baik. Dukungan dan komitmen Polres Bitung menjadi energi positif bagi kami untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ucapnya.

Carlos menambahkan, melalui kolaborasi yang solid, pelaksanaan sensus ini akan berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas untuk kemajuan pembangunan ekonomi Kota Bitung.

Sementara itu, Kapolres Bitung Albert Zai menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Polres Bitung untuk mendukung penuh suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya bersama membangun fondasi

pembangunan nasional yang berbasis data. "Kami menyambut baik kunjungan silaturahmi dari Kepala BPS Kota Bitung beserta jajaran. Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan data yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran," kata Kapolres.

Kapolres juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Bitung untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus tersebut dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan objektif kepada petugas sensus. "Dukungan dunia usaha sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan, sehingga mampu menjadi pijakan kuat bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan," tandasnya. **(hry)**



Gelar Musancab, 8 PAC PDI Perjuangan Bitung Baru Terpilih

BENDAHARA Umum DPP PDI Perjuangan Olly Dondokambey menghadiri Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDI Perjuangan Bitung, yang dilaksanakan di Kelurahan Manembo- nembo, Kecamatan Matuari, Senin (11/05).

Setelah dibuka oleh Olly Dondokambey yang juga Ketua DPD PDI

Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut), Musancab dalam rangka pembentukan pengurus baru di tingkat kecamatan itu, selanjutnya dipimpin Fabian Kaloh selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan Sulut.

Dalam sambutannya, Olly menjelaskan mekanisme yang dianut PDI Perjuangan, di mana penentuan pengurus di semua jenjang menggunakan mekanisme demokrasi terpimpin, sehingga keputusan akhir yang dihasilkan bersifat solid dan mengikat. "Ingat, partai kita menggunakan mekanisme demokrasi terpimpin. Jadi semua usulan dari bawah kita seleksi di DPD, begitu juga di tingkat DPC," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Olly juga

membakar semangat para kader agar terus menjaga soliditas dan kebersamaan, yang menjadi modal penting partai menjalankan agenda politiknya. "PDI Perjuangan merupakan partai besar di Sulut, termasuk di Kota Bitung. Kita jangan cuma kuat di saat menjelang pemilu, tetapi kita harus kuat setiap hari bersama rakyat. Kita masih kuat, kita masih memimpin parlemen. Semuanya masih berjalan baik. Jadi harus tetap semangat dan kita rebut kembali kemenangan itu," tandasnya.

Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Bitung Gerald Mantiri selaku menegaskan kesiapan untuk memimpin konsolidasi internal di daerah ini, sekaligus menjalankan amanat partai dalam mengawal dan memperjuangkan hak masyarakat. **(hry)**

Komposisi PAC PDI Perjuangan se-Kota Bitung:

KECAMATAN LEMBEH UTARA
•KETUA: ROBERT MASILI
•SEKRETARIS: LGBAL ANTARANI
BENDAHARA: SOFIA TOLI

KECAMATAN MADIDIR
•KETUA: ABDI BAWEKES
•SEKRETARIS: JOHNY THEO
•BENDAHARA: ANSYE SUMOLANG

KECAMATAN LEMBEH SELATAN
•KETUA: SHERLY MANGIMBULUDE
•SEKRETARIS: SADIA KANSIL
•BENDAHARA: NIKSEL ARODE

KECAMATAN GIRIAN
•KETUA: RENDY ROMPAS
•SEKRETARIS: OKTAVIANUS TAMAKAENGGE
BENDAHARA: FERNANDO TUMANGKENG

KECAMATAN AERTEMBAGA
•KETUA: GASPAR MANIKOME
•SEKRETARIS: NOVA NANGOV
•BENDAHARA: NEFA BREK

KECAMATAN RANOWULU
•KETUA: YOSEF KATOPO
•SEKRETARIS: SANDRO LUMATAUW
•BENDAHARA: SONNY WUWUNG

KECAMATAN MAESA
•KETUA: SYAM PANAI
•SEKRETARIS: DEMY KAUMBUR
•BENDAHARA: FITRIA MAILAKAY

KECAMATAN MATUARI
•KETUA: MAIKEL WALEWANGKO
•SEKRETARIS: SILFANUS GANDA
•BENDAHARA: IRENE LENGKONG



KEMENTERIAN SOSIAL MEMILIKI 3.645 PAKET PENGADAAN DENGAN TOTAL RP2,85 TRILIUN

Sepatu, Bingkai Foto Presiden-Wapres di Sekolah Rakyat Nilai Miliaran Rupiah

DUGAAN penggelembungan anggaran pada program Sekolah Rakyat ramai diperbincangkan di media sosial, setelah terungkap bahwa ada perbedaan signifikan antara harga berbagai barang yang dianggarkan dan harga wajar barang-barang tersebut di pasar.

BBC News Indonesia dan sejumlah lembaga antikorupsi menemukan ketidakwajaran harga sejumlah barang yang ditawarkan penyedia di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni Inaproc. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyebut harga sepatu yang ramai dibicarakan tersebut merupakan perkiraan pada tahap perencanaan yang berkisar Rp500.000 sampai Rp700.000. Akan tetapi, harga realisasi pembelannya sekitar Rp250.000 hingga Rp640.000, dan sudah termasuk kaos kaki.

Dia mengklaim hal ini sudah sejalan dengan aturan pengadaan. Ia pun menambahkan pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat tidak sepenuhnya dilakukan secara terpusat oleh kementerian. Untuk tahap awal, pembelian diserahkan kepada masing-masing sekolah. "Anggaran dikasihkan ke sekolah, sekolah beli sendiri-sendiri," ujar Saifullah. Akan tetapi, Program Officer Divisi Tata Kelola Partisipasi dan Demokrasi Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mewanti-wanti harga yang tidak wajar dalam pengadaan bukan sekadar isu teknis, tapi indikasi serius adanya potensi penggelembungan harga.

"Ketika negara justru membeli dengan harga yang sangat jauh diatas kewajaran, publik berhak curiga bahwa ada persoalan dalam proses perencanaan, penentuan spesifikasi teknis, hingga dalam proses penentuan penyedia," ujar Agus. "Masalahnya tidak lagi sekadar inefisiensi anggaran, melainkan pergeseran berbahaya menuju praktik korupsi yang terselubung dalam prosedur yang tampak sah secara administratif," tambahnya. Upaya penggelembungan anggaran atau mark-up



MENTERI Sosial Saifullah Yusuf memberi arahan kepada murid saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas di Lampung, Minggu (26/04).

bukan modus baru dalam tindak pidana korupsi. Hal ini juga diduga terjadi pada program prioritas pemerintah karena ada ketidakwajaran harga pada sejumlah barang yang masuk dalam rencana pengadaan atau telah direalisasikan.

"Masalahnya, seringkali penyedia menawarkan harga di e-katalog yang nilainya sangat besar dibandingkan e-commerce. Ketika ada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah yang membeli harga tinggi dibandingkan dengan e-commerce, upaya penindakan atau pengawasannya cenderung tidak ada," ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan kajian terkait program ini. "Kajian ini guna memotret proses bisnis dan penerapannya di lapangan, apa saja dan di mana saja yang masih rentan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (06/05). Pada Jumat (08/05) ini, Saifullah telah menemui pimpinan KPK untuk menjelaskan prosedur pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, tidak

memberikan respons saat ditanya mengenai tindak lanjut dari dugaan penggelembungan anggaran yang mungkin terjadi pada Sekolah Rakyat.

Apa saja temuan dari pengadaan Sekolah Rakyat?

BBC News Indonesia menelusuri sistem pengadaan Inaproc yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Pencarian dibatasi hanya pada Kementerian Sosial. Pada Rencana Umum Pengadaan tahun anggaran 2026, Kementerian Sosial memiliki 3.645 paket pengadaan dengan total nilai Rp2,85 triliun. Dari rencana ini, sebanyak 933 paket telah direalisasikan dengan total nilai Rp336,9 miliar. Dari nilai Rp336,9 miliar, BBC News Indonesia menemukan pengadaan kaos kaki sebesar Rp2,42 miliar. Namun, pengadaan sepatu belum direalisasikan. Hal ini tidak sesuai dengan klaim menteri bahwa sepatu sudah termasuk kaos kaki.

Selain itu, ada sejumlah pengadaan dengan perbedaan signifikan antara harga pada e-katalog dan harga toko resmi. Antara lain, pengadaan drone, lambang garuda, foto bingkai presiden dan wakil presiden, jam dinding, gerobak angkut, dan mesin cuci. Pada pengadaan drone, misalnya, anggaran total realisasinya



NATIONAL

sebesar Rp4,03 miliar. Nama paketnya hanya tertulis "Pengadaan drone pada sekolah rakyat" yang dibagi dalam dua paket melalui dua penyedia, yakni Media Citra Komunikasi dan Pilar Kreasi Teknologi. Pada laman Inaproc, Media Citra Komunikasi hanya memiliki dua jenis drone yaitu DJI Mini 5 Pro Combo RC2 Plus seharga Rp25 juta dan DJI Air 3S Fly seharga Rp31,7 juta.

Akan tetapi, harga resmi sebelum diskon di toko resmi DJI lebih rendah. DJI Mini 5 Pro dengan spesifikasi yang sama berharga Rp18 juta. Adapun DJI Air 3S Fly dijual Rp24

penyedia.

Namun, harga resmi dengan spesifikasi dan merk yang sama di toko resmi tercatat Rp1,82 juta. Anggaran untuk jam dinding juga telah dikeluarkan sebesar Rp1,82 miliar. Dalam e-katalog penyedia, satu-satunya jam dinding merk Seiko yang dijualnya dibanderol seharga Rp666.000. Namun, tidak ada spesifikasi jam dalam katalog tersebut. Harga untuk jam serupa di toko resmi Seiko berkisar pada angka Rp360.000. Barang lain adalah foto bingkai Presiden dan Wakil Presiden yang direalisasikan sebesar Rp2,72 miliar. Harga

Untuk sepatu Mills seri Cruz Triple Black dibanderol Rp505.000. Padahal harga aslinya sebesar Rp369.000 di toko resminya. Sepatu Specs seri Coanda dihargai Rp500.000 pada katalog. Padahal di toko resminya harganya berkisar Rp599.000 hingga Rp749.000. Di penyedia lain, terdapat sepatu olahraga sebesar Rp721.000 hingga Rp750.000 tanpa gambar dan spesifikasi yang jelas. Untuk sepatu harian, ada tiga penyedia yang dipilih dalam e-katalog. Ketiganya tidak menampilkan sepatu keluaran Stradenine. Salah satu penyedia memberikan harga sepasang sepatu sekolah sebesar Rp499.000.

Semua pengadaan sepatu ini di bawah satuan kerja Sekretariat Jenderal dengan penyedia yang sudah tercantum sehingga semestinya tidak bisa sekolah membeli sendiri seperti klaim menteri. Sementara itu, berdasarkan catatan ICW, rencana umum pengadaan 2026 dengan menggunakan kata kunci 'sekolah rakyat' totalnya mencapai Rp3,8 triliun dengan rencana pengadaan sebanyak 1.013 paket. Temuan ICW rencana belanja yang paling besar ada pada pekerjaan konstruksi yakni sekitar Rp3,1 triliun atau 80,5% dari total rencana belanja yang dikhususkan untuk sekolah rakyat.

"Besarnya rencana belanja untuk sekolah rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah. Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, juga menemukan beberapa hal dalam Inaproc. Salah satunya terkait dengan konstruksi berupa biaya bongkaran gedung dan bangunan yang mencapai Rp3,8 miliar.

'Seperti tak lakukan negosiasi, padahal fiturnya ada'

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyoroti adanya pergeseran pola metode pengadaan yg sebelumnya kebanyakan tender, kini menjadi e-purchasing. Melalui metode ini, kementerian/lembaga/pemerintah daerah bisa memilih sendiri penyedia yang sesuai dengan kebutuhan. Persoalannya, harga di e-katalog yang nilainya sangat besar dibandingkan e-commerce atau toko resmi. Di sisi lain, kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak melakukan negosiasi.

Padaahal, e-purchasing telah menyediakan fitur untuk bernegosiasi sehingga bisa melakukan penawaran harga. "Ini harusnya bisa dilakukan, tapi yang terjadi harganya tetap dibiarkan tinggi tanpa ada penindakan dan pengawasan. Hal ini berpotensi menjadi



juta. Artinya, pengadaan kedua perangkat itu punya selisih sekitar Rp7 juta dengan harga di toko resmi. Sementara itu, produk drone milik Pilar Kreasi Teknologi menawarkan pilihan DJI Air 3S Fly dan seri mavic, tapi tertulis belum aktif.

Begitu pula dengan mesin cuci dua tabung. Kebutuhan mesin cuci memang ada pada tiap Sekolah Rakyat mengingat konsep asrama yang dijalankan. Akan tetapi, harga yang ditawarkan penyedia di e-katalog sebesar Rp2,55 juta untuk mesin cuci dua tabung merk Polytron. Ini satu-satunya jenis mesin cuci yang ada di dalam e-katalog

sepasang bingkai dan foto di penyedia sebesar Rp1 juta. Harga sepatu olahraga dalam salah satu katalog penyedia yang dipilih Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat. Untuk pengadaan sepatu, realisasi yang sudah terjadi pada anggaran 2025 berupa sepatu dinas, sepatu harian, dan sepatu olahraga untuk guru sebesar Rp4,23 miliar. Kemudian, ada juga sepatu harian, sepatu olahraga, serta sepatu PDH dan PDL untuk siswa sebesar Rp24,6 miliar. Ada satu penyedia di dalam e-katalog yang menawarkan dua sepatu olahraga bermerek Mills dan Specs.



celah korupsi yang difasilitasi oleh sistem dan regulasi."

Data penindakan KPK sepanjang periode 2004 hingga 2025, terdapat 446 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari total 1.782 kasus. Penyelewengan pada pengadaan barang dan jasa ini menjadi modus perkara terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi. Secara terpisah, Agus berkata dugaan harga sepatu hingga Rp700.000 dalam program Sekolah Rakyat bukan sekadar isu teknis pengadaan, tapi indikasi serius adanya potensi penggelembungan harga yang tidak bisa ditoleransi. Kondisi pasar normal, sepatu siswa dengan kualitas yang sangat baik tidak berada pada rentang harga yang tertera di e-katalog. "Ketika negara justru membeli dengan harga yang sangat jauh diatas kewajaran, publik berhak curiga bahwa ada persoalan dalam proses perencanaan, penentuan spesifikasi teknis, hingga dalam proses penentuan penyedia," ujar Agus.

"Situasi ini semakin problematik ketika sebelumnya pemerintah menyampaikan narasi yang tidak konsisten terkait komponen pengadaan, seperti kasus kaos kaki yang terbukti dianggarkan terpisah."

Ia juga melanjutkan, persoalannya bukan hanya pada angka Rp700.000 itu sendiri. Namun, ada pada pola sistemik pengadaan yang membuka ruang lebar untuk melakukan pembengkakan biaya. Ruang lebar itu berupa pemisahan paket pengadaan, penggunaan e-purchasing tanpa pengujian kewajaran harga, serta lemahnya transparansi dalam justifikasi spesifikasi merupakan kombinasi yang kerap menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi. Dalam banyak kasus, praktik semacam ini dilakukan secara "legal prosedural", tetapi secara substansi merugikan keuangan negara dan merugikan hak siswa sekolah rakyat untuk mendapatkan kualitas barang/jasa yang lebih baik. "Jika tidak diuji secara kritis, maka penggelembungan harga dapat dengan mudah disamarkan sebagai "spesifikasi khusus" atau "kualitas premium"," kata Agus. Agus pun mendorong KPK dan Kejaksaan untuk aktif dan tidak hanya menunggu laporan formal. Langkah proaktif melalui audit terhadap kewajaran harga dan penelusuran desain pengadaan menjadi keharusan, terutama karena program ini dibiayai uang publik dan menyasar kelompok rentan.

"Aparat penegak hukum harus menguji apakah harga tersebut wajar, bagaimana spesifikasi disusun, siapa penyediannya, dan apakah terdapat indikasi pengondisian. Pendekatan "follow the money" juga penting untuk memastikan tidak ada aliran keuntungan tidak sah di balik kontrak yang tampak formal."



Di sisi lain, ia menambahkan situasi ini menjadi ujian serius bagi efektivitas Perpres Pengadaan Barang dan Jasa terbaru, yaitu Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi itu menawarkan fleksibilitas tinggi tapi juga berpotensi mereduksi ketajaman pengawasan apabila tidak disertai kontrol yang kuat dan transparansi yang memadai. Jika praktik semacam ini terjadi pada program yang menyasar kelompok paling rentan, maka konsekuensinya jauh lebih dalam: bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga erosi kepercayaan publik yang mendasar terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran.

Keterangan nama paket tertulis foto bingkai Prabowo dan Gibran tersebut untuk keperluan Sekolah Rakyat. Terdapat setidaknya empat paket pengadaan yang dilakukan. Tiga di antaranya dilakukan dalam penganggaran tahun 2025, serta satu lainnya di tahun 2026. Pada realisasi pembelian di tahun lalu, Kementerian Sosial menggelontorkan Rp 806 juta untuk paket bernama "Pengadaan Non Operasional Foto Bingkai Presiden Wapres". Status pengerjaan proyek pengadaan hingga kini masih tertulis "dalam proses".

Kementerian Sosial sebagai pelaksana program sekolah rakyat juga memakai anggaran negara sebesar Rp 519 juta untuk membeli paket bernama "Foto Bingkai Presiden dan Wapres SR 1C". Serta pengadaan untuk barang serupa di kontrak terpisah senilai Rp 91 juta. Pada tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Sosial kembali membeli paket foto bingkai presiden dan wakil presiden. Nilainya jauh lebih besar dibanding realisasi pengadaan barang yang sama di tahun lalu, yaitu Rp 2,72

miliar. Dalam satu paket yang sama tersebut, Kementerian Sosial juga melakukan pembelian figur lambang garuda. Foto bingkai presiden, wakil presiden, dan figur lambang garuda itu diperuntukkan buat aksesoris ruang kelas sekolah rakyat. Seluruh paket pengadaan foto bingkai presiden, wakil presiden, dan figur lambang garuda untuk sekolah rakyat dibeli dari Nawara Cipta Permai secara electronic purchasing. Tempo menelusuri perusahaan penyedia paket yang dipilih Kementerian Sosial di situs Inaproc.

Nawara Cipta Permai berlokasi di Jakarta Timur, sebagaimana keterangan pada profil perusahaan di laman Inaproc. Barang berupa foto bingkai presiden, wakil presiden, beserta figur lambang garuda tertera dalam produk katalog di toko penyedia tersebut. Foto bingkai presiden dan wakil presiden dijual dengan masing-masing seharga Rp 529.999. Sedangkan patung Garuda Pancasila berbahan fiber dijual seharga Rp 345.000. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui ada pengadaan foto bingkai presiden dan wakil presiden untuk sekolah rakyat. Dia mengatakan pembelian foto bingkai Prabowo dan Gibran itu bisa ditelusuri.

Dia menjelaskan kementerian telah menugaskan unit pelaksana dan penanggung jawab dalam pengadaan barang serta jasa untuk sekolah rakyat tersebut. Menurut dia, sudah ada Pejabat Pembuat Komitmen di kementeriannya yang ditugaskan untuk mengurus segala hal perihal pengadaan barang dan jasa. "Yang bisa menjelaskan lebih detail itu adalah penanggung jawabnya. Kalau saya yang menjelaskan nanti malah keliru," kata dia saat ditemui di kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026. **(npn/dbs/dth)**



Di Malut, NTB Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan, di Manado Enjoy dan Adem Ayem



APARAT TNI membubarkan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara. Pihak TNI menilai film itu mendapat banyak penolakan karena bersifat provokatif.

"Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian, keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya," ujar Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan nobar yang disertai diskusi itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5), pukul 20.00 WIT. Jani menyebutkan penilaian negatif terhadap isi film datang dari masyarakat.

"Ini bukan pendapat pribadi saya. Tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukkan, banyak yang sifat

provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial," ujarnya. Jani kemudian meminta kegiatan nobar tersebut tidak dilanjutkan karena isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif dan mudah dipolitisasi. Ia kemudian mempersilakan pihak penyelenggara melanjutkan kegiatan diskusi seperti yang sudah diagendakan.

"Berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup itu hal yang positif, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk kegiatan (nobar) saya minta tolong dihentikan, agar tidak dijadikan bahan (untuk) dipolitisir kemudian hari," tuturnya.

Menurut dia, efek dari pemutaran film itu bisa terjadi beberapa hari ke depan. Jani kemudian mengajak pihak penyelenggara untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. "Mari kita saling bekerja sama, mari kita saling menghargai, kami selaku aparat punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan maupun kondusif wilayah yang menjadi tanggung jawab kami," imbuh Jani.

Sementara itu, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan TNI tersebut. Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta hak warga untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi. "Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi

dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita.

Ia mengatakan kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, menurut dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.

Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Sebab, menurut dia, kegiatan ini berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.

Pembubaran Nobar film Pesta Babi juga berlangsung di mana-mana. Termasuk di Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur. Namun, di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), film ini adem-adem saja. Ditonton banyak kalangan dan tidak ada perdebatan. Baik Kriten maupun ndari kalangan muslim, membaur menonton film tersebut di sejumlah bioskop ternama di Manado. "Kita nonton saja. Namanya juga hasil seni. Tidak harus dicntoh, tapi jadikan pelajaran. Toh kita bisa menyaring mana yang benar dan mana yang sesat. Untuk apa ribut-ribut." Demikian seperti dikutip dari media sosial yang diposting warga Manado dan Sulut pada umumnya. (idh/imk/dth)



Komisaris Utama : Suhendro Boroma
Direktur Utama : Marlon Sumaraw
Direktur : Tommy Waworundeng

Konsultan IT Development: Andria Wahyudi Skom MEng ACA

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Hairil Paputungan

Editor : Chanly Mumu, Filip Kapantow
Reporter: Novlin Surentu, Nur Fadilah, Jemmy Gahansa (Talaud), Herry Lengkong (Bitung), Aji Pramono (Minut), Buyung Algiffari Potabuga (Biro Bolmong Raya)

Artistik: Bonit Anggi
Divisi Bisnis: Christian Sumolang, Slamet Supriyadi, Recky Gosal, Candra Limbo

AdsOp & Programmatic: Clavel Lukas

Web Developer: Clavel Lukas

Media Content manadopost.id,
MP Digital & news room

Kejati: Tak Ada Kriminalisasi Bupati Sitaro!

DITAHAN DENGAN ALAT BUKTI KUAT, TERMASUK PEMERIKSAAN 1.350 SAKSI KORBAN GUNUNG RUANG



TIM penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hingga saat ini, korps Adhyaksa tersebut telah memeriksa sebanyak 1.350 saksi dari total 1.900 warga yang menjadi korban terdampak bencana.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sulut, Eri Yudianto, menegaskan bahwa penetapan Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit (CIK), sebagai tersangka didasarkan pada alat bukti yang sangat kuat. Pihaknya mengaku mengantongi dokumentasi lengkap terkait penderitaan warga di lapangan sebagai bukti bahwa kasus ini menyentuh aspek kemanusiaan yang mendalam.

Dalam pemaparannya Senin (11/5/2026), Eri membeberkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka berkaitan dengan dana bantuan yang mengendap selama hampir satu tahun. Dana yang seharusnya sudah didistribusikan pada akhir tahun 2024, faktanya baru mulai disalurkan pada Desember 2025. Sebagai kepala daerah,

CIK dinilai bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan dan adanya dugaan pengkondisian dalam pembagian barang bantuan.

Menyikapi perkembangan situasi pasca-penahanan, Kejati Sulut juga menyoroti adanya fenomena flying victim opinion. Eri menilai ada upaya sistematis untuk membangun narasi seolah-olah penegakan hukum ini adalah bentuk kezaliman atau kriminalisasi. Ia menegaskan bahwa tim penyidik bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan murni bergerak dalam koridor hukum tanpa adanya motif politik.

Terkait aksi simpati dan doa bersama yang sempat digelar di Tugu Palapa, pihak Kejati menganggap hal tersebut sebagai bentuk solidaritas yang wajar. Namun, Eri mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam penggiringan opini oleh pihak tertentu. Ia menekankan bahwa faktanya jauh lebih banyak korban di Tagulandang yang saat ini sedang menunggu keadilan atas hak-hak mereka yang terhambat akibat praktik korupsi tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (11/5/2026), pihak Kejaksaan memastikan bahwa seluruh langkah hukum yang diambil telah sesuai prosedur dan didasari oleh alat bukti yang solid. Eri menegaskan bahwa terdapat upaya sistematis melalui media massa untuk mengaburkan substansi perkara, padahal penyidikan yang dilakukan murni bertujuan

untuk menegakkan hukum tanpa ada unsur kriminalisasi maupun tindakan zalim. Dalam pemaparannya, Eri mengungkapkan bahwa penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana sangat nyata dalam kasus dugaan korupsi ini. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 1.350 saksi dari total 1.900 warga yang terdampak. Pihak Kejaksaan juga telah mengantongi dokumentasi lengkap mengenai kondisi para korban di lapangan yang nasibnya terabaikan akibat penyaluran bantuan yang bermasalah.

Konstruksi perkara mengungkap adanya keterlambatan penyaluran dana bencana yang sangat signifikan. Dana yang seharusnya sudah tuntas didistribusikan pada akhir tahun 2024 ditemukan mengendap hingga satu tahun lamanya, di mana hingga Desember 2025 penyalurannya baru mencapai 10 persen. Tersangka CIK diduga melakukan pengkondisian terhadap pembagian barang bantuan yang seharusnya sudah diterima masyarakat sejak jauh hari.

Eri menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa tindakan mengendapkan dana selama hampir setahun tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Sebagai Bupati, CIK dinilai harus bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan dan distribusi fisik bantuan tersebut demi kepentingan warga yang terdampak bencana. **(dik/dbb/dth)**

MAY PROMO

Validity May 1st - 31st, 2026



IDR **575** K
Nett/room/night

**STAY AT CLUB SUPERIOR ROOM | BREAKFAST FOR 2 PERSONS
| FREE ACCESS SWIMMING POOL | FREE WIFI**



For more info & Reservation

Hona 085298589090 | Alvionita 082292712324

Alfredo 081355682011

Jl. Sam Ratulangi No. 458 Ranotana, Kota Manado, Sulawesi Utara
Telp +62 431 822888

Jaecoo J5, Satu dari 10 Mobil Listrik Terlaris April 2026



PASAR mobil listrik di Indonesia mengalami kenaikan pada April 2026. Berikut ini daftar 10 mobil listrik terlaris pada bulan kelima 2026.

Berdasarkan data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terjadi lonjakan penjualan wholesales mobil nasional di April 2026 naik hingga 80.776 unit, naik 31,8% dibandingkan Maret 2026. Ini menjadi titik balik setelah pasar sempat melambat akibat periode libur Lebaran di bulan sebelumnya.

Dari total penjualan mobil bensin tersebut, sebanyak 14.815 unit mobil listrik turut menyumbang angka penjualan nasional. Artinya sebanyak 18,34% penjualan mobil listrik dari total pasar nasional. Ini membuktikan mobil listrik menjadi salah satu pemain kunci yang pertumbuhannya

makin agresif.

SUV listrik Jaecoo J5 sukses mempertahankan takhta sebagai mobil listrik terlaris di Indonesia dengan distribusi 3.179 unit. BYD masih bisa bernapas lega karena segmen MPV mereka, BYD M6, justru naik daun. Mobil 7-seater ini terdistribusi sebanyak 2.472 unit, melonjak dari bulan sebelumnya yang hanya 523 unit. Begitu juga dengan model flagship Denza D9 yang naik menjadi 1.032 unit. Di posisi ketiga, BYD Sealion 07 tampil sebagai primadona baru dari pabrikan asal Tiongkok tersebut dengan angka 1.236 unit. Menariknya, BYD Atto 1 yang biasanya mendominasi dengan angka ribuan unit, kini justru melorot ke angka 108 unit.

Geely, mulai menunjukkan taringnya. Model compact EV mereka, Geely EX2, diam-diam menyedot perhatian dengan distribusi sebanyak 1.042 unit, menempel ketat posisi empat besar. Sepanjang Januari-April 2026, sebanyak 47.781 unit

mobil listrik sudah dikirim ke dealer. Artinya ada kenaikan 89,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, kala itu mobil listrik mencapai 25.231 unit. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan masih menunjukkan tren positif yang sangat kuat.

Berikut adalah daftar mobil listrik terlaris untuk periode April 2026, diurutkan dari unit terbanyak hingga yang paling sedikit:

1. Jaecoo J5: 3.179 unit
2. BYD M6: 2.472 unit
3. BYD Sealion 07: 1.617 unit
4. Geely EX2: 1.042 unit
5. Denza D9: 1.032 unit
6. AION V: 449 unit
7. Wuling Darion EV: 421 unit
8. Chery iCar 03 (termasuk J6): 391 unit
9. VinFast VF3: 378 unit
10. Wuling Eksion: 376 unit
11. AION UT: 321 unit
12. BYD Atto 1: 108 unit. **(ria/dbs/dto)**



Penjualan Mobil Listrik di RI Melonjak, LCGC Makin Menyusut



TREN kendaraan ramah lingkungan di Indonesia melonjak. Penjualan mobil listrik (EV) per April dilaporkan jadi angka tertinggi sepanjang tahun ini 2026.

Berdasarkan data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terjadi lonjakan penjualan wholesales mobil nasional di April 2026 naik hingga 80.776 unit, naik 31,8% dibandingkan Maret 2026. Ini menjadi titik balik setelah pasar sempat melambat akibat periode libur Lebaran di bulan sebelumnya.

Dari total penjualan mobil bensin tersebut, sebanyak 14.815 unit mobil listrik turut menyumbang angka penjualan nasional. Artinya sebanyak 18,34% penjualan mobil listrik dari total pasar nasional. Ini membuktikan mobil listrik menjadi salah satu pemain kunci yang pertumbuhannya makin agresif. Sepanjang Januari-April 2026, sebanyak 47.781 unit mobil listrik sudah dikirim ke dealer. Artinya ada kenaikan 89,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, kala itu mobil listrik mencapai 25.231 unit.

Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem kendaraan listrik sudah semakin matang. Masuknya berbagai brand baru, terutama dari produsen Tiongkok yang menawarkan fitur canggih dengan harga kompetitif, memberikan pilihan luas bagi konsumen dari berbagai segmen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang tetap konsisten memberikan relaksasi pajak dan pembebasan

aturan ganjil-genap menjadi daya tarik utama bagi penduduk kota besar seperti Jakarta.

Lebih lanjut melirik data lima tahun terakhir, penjualan mobil listrik terus melesat. Rinciannya sebagai berikut:

2021: 687 unit
2022: 10.327 unit
2023: 17.051 unit
2024: 43.189 unit
2025: 103.931 unit
2026 (Jan-April): 47.781 unit

Sebenarnya bukan cuma mobil listrik BEV, kendaraan hibrida (Hybrid Electric Vehicle/HEV) juga ikut terkerek naik sebesar 42,6 persen jika dibandingkan lima bulan sepanjang 2025. Diketahui periode lima bulan pertama 2026 sudah 26.336 unit mobil hibrida yang dikirim ke dealer. Pertumbuhan mobil hibrida juga terjadi dalam lima tahun terakhir. Memang kalau dari segi kenaikan angka tidak sebesar BEV. Rinciannya sebagai berikut:

2021: 2.472 unit
2022: 10.344 unit
2023: 54.179 unit
2024: 59.903 unit
2025: 65.943 unit
2026 (Jan-April): 26.339 unit

Sementara itu, segmen mobil Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) juga mengalami lonjakan yang signifikan. Pada periode Januari-April 2025 belum banyak pabrikan yang masuk ke segmen ini, namun tahun 2026 angkanya jadi besar. Total penjualannya 2.089 unit dari sebelumnya cuma 91 unit. Data menunjukkan mobil PHEV juga terus membetot perhatian masyarakat Indonesia.

Rinciannya sebagai berikut:
2021: 46 unit

2022: 10 unit
2023: 128 unit
2024: 136 unit
2025: 5.270 unit
2026 (Jan-April): 2.089 unit

Bagaimana dengan mobil ICE atau mobil konvensional? jika melihat data penjualan angkanya terus tergerus. Meski demikian penjualannya masih mendominasi pasar Indonesia. Ambil contoh penjualan mobil ICE non low cost green car (LCGC) pada 2019, sebelum masifnya mobil listrik dan kawan-kawan, penjualan bisa tembus 814.641 unit. Sebagai pembandingan enam tahun kemudian, penjualan jadi 505.857 unit, di sisi lain mobil listrik 103.931 unit, PHEV jadi 5.270 unit, dan hibrid 65.943 unit. Penjualan mobil ICE dalam 5 tahun terakhir:

2021: 737.477 unit
2022: 869.153 unit
2023: 729.739 unit
2024: 585.729 unit
2025: 505.857 unit
2026 (Jan-April): 175.758 unit

Mobil LCGC juga terus menyusut. Dulu bisa terjual 200 ribuan per tahun. Tepatnya pada 2019, penjualan bisa mencapai 217.454 unit. Tapi dalam tiga tahun terakhir pasarnya makin tergerus. Bahkan lima bulan 2026 saja sudah minus 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan LCGC dalam lima tahun terakhir:

2021: 146.520 unit
2022: 158.206 unit
2023: 204.705 unit
2024: 176.766 unit
2025: 122.686 unit
2026 (Jan-April): 37.823 unit.(riar/din/dto)

Ikon di Markas Barca

OLIVIA Rodrigo terpotret menyaksikan pertandingan El Clásico, Barcelona versus Real Madrid, di Camp Nou. Kemunculan penyanyi idola Gen Z itu bukan tanpa sebab nih guys, tapi ada proyek collab.

Pelantun Drivers License itu hadir di Camp Nou pada 10 Mei 2026 waktu setempat sebagai bagian dari



kolaborasi besar FC Barcelona dengan Spotify. Yap, Olivia Rodrigo pendukung Barcelona, kali ini. Kolaborasi Spotify dengan FC Barcelona ditandai dengan cap emblem hati OR khas Olivia Rodrigo di depan jersey mereka. Sang jebolan Disney jadi artis kedelapan, sekaligus termuda, yang pernah tampil di jersey Barca.

Olivia Rodrigo mengikuti jejak ikon musik lainnya termasuk Drake, Coldplay, hingga The Rolling Stones. Jersey berlogo OR dipakai dalam pertandingan El Clásico. Kehadiran Olivia juga tentu buat ngasih dukungan untuk tim asuhan Hansi Flick itu. Kunjungannya ke Spotify Camp Nou juga termasuk agenda pertemuan dengan para

pemain sebelum pertemuan dimulai. Ada momen Olivia berfoto dengan Lamine Yamal. Sehari sebelumnya, OR juga dikabarkan mengunjungi sesi latihan tim putri Barcelona (Barça Femení) buat menyapa mereka.

Duduk di tribun VIP bikin pemeran High School Musical The Musical The Series itu jadi sorotan semua orang. Kehadiran Olivia dianggap jadi dewi fortuna karena Barcelona berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Kolaborasi Olivia Rodrigo, Spotify, dan FC Barcelona bertepatan dengan persiapan perilsan album ketiga si penyanyi. Album berjudul you seem pretty sad for a girl so in love dijadwalkan rilis pada 12 Juni 2026. Sebelum ke Camp Nou, Olivia juga menggelar private concert bertajuk Billions Club Live di Barcelona. Salah satu lagu terpopulernya, drop dead, kini juga masuk playlist resmi Barça Matchday yang diputarkan di stadion sebelum laga dimulai.

Jersey dengan Celenia Gemas

Gayanya saat tampil dengan jersey menuai sorotan. Olivia bekerja sama dengan klub asal Spanyol tersebut untuk merilis jersey dan kaus 'gemas' Jersey Barca versi Olivia Rodrigo hadir dengan logo inisial namanya di bagian depan. Sedangkan di bagian belakang, tertulis nama belakang dan angka favoritnya. Pelantun 'Happier' asal AS itu memadukannya dengan celana 'gemas'. Sedangkan untuk t-shirt yang juga hasil kerjasama dengan Spotify, wanita 23 tahun tersebut memadukannya rok mini putih polka dot.

Gayanya memakai sweater selagi membawa syal dengan namanya dari motif dan warna khas dari klub tersebut. Tak hanya merilis merchandise bersama Barca, Olivia Rodrigo juga mendukung klub tersebut dengan menonton pertandingan semalam. Foto: Instagram @fcbarcelona. Dalam kesempatan ini, pelantun 'good 4 u' tersebut bertemu Lamine Yamal selagi mengenakan dress hitam dengan aksesoris cut out renda yang dipadukan boots. (aay/mts/dth)

Olivia Rodrigo



HEAD TO HEAD HARGA HONDA VARIO DAN YAMAHA AEROX MEI 2026

Vario Termurah Rp24 Juta, Termahal Rp3 1 Juta, Aerox Termurah Rp28 Juta, Termahal Rp4 1 Juta

PERSAINGAN skutik sporty di Indonesia masih diramaikan dua nama populer, yakni Honda Vario dan Yamaha Aerox. Keduanya sama-sama menawarkan tampilan agresif, fitur modern, serta performa mesin yang cocok untuk mobilitas harian maupun touring jarak dekat. Ini harga terbaru Vario dan Aerox di bulan Mei 2026.

Honda Vario dikenal sebagai motor matik yang menggabungkan desain sporty dengan kepraktisan tinggi. Beda dengan Yamaha Aerox yang memakai dek tengah atau tunnel besar, Honda Vario tetap mempertahankan dek rata, sehingga lebih mudah digunakan membawa barang bawaan harian seperti tas, galon kecil, hingga perlengkapan kerja.

Honda sendiri menawarkan Vario dalam dua pilihan mesin, yakni 125 cc dan 160 cc. Khusus Vario 125, ada pilihan varian

standard dan Street dengan nuansa lebih adventure. Sementara Vario 160 hadir dengan desain lebih premium dan performa lebih bertenaga.

Harga Honda Vario Mei 2026 (OTR Jakarta)

1. Vario 125 CBS: Rp 24.560.000
2. Vario 125 CBS-ISS: Rp 26.215.000
3. Vario 125 Street: Rp 26.649.000
4. Vario 160 CBS Grande: Rp 28.375.000
5. Vario 160 CBS Active: Rp 28.625.000
6. Vario 160 ABS: Rp 31.256.000

Di kubu Yamaha, Aerox masih menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan skutik bergaya sporty ala motor balap. Desain bodinya terlihat lebih gambot dan agresif, lengkap dengan posisi berkendara yang mendukung karakter sporty.

Yamaha kini masih menjual Aerox generasi sebelumnya bersamaan dengan Aerox Alpha terbaru. Model Aerox Alpha hadir dengan sejumlah pembaruan, termasuk teknologi YECVT pada varian tertentu yang membuat sensasi berkendara terasa lebih responsif. Selain itu, mesin Aerox juga dibekali teknologi VVA (Variable Valve

Actuation) untuk menjaga performa tetap optimal di berbagai putaran mesin. Varian tertingginya bahkan hadir dengan nuansa premium dan fitur lebih lengkap.

Harga Yamaha Aerox Mei 2026 (OTR Jakarta)

1. Aerox Standard: Rp 28.880.000
2. Aerox Cyber City: Rp 29.080.000
3. Aerox Connected ABS: Rp 32.115.000
4. Aerox Alpha Standard: Rp 30.200.000
5. Aerox Alpha Cyber City: Rp 30.750.000
6. Aerox Alpha Cyber City ABS: Rp 34.290.000
7. Aerox Alpha Turbo: Rp 39.550.000
8. Aerox Alpha Turbo Ultimate: Rp 41.730.000
9. Aerox Alpha Turbo 70th Livery: Rp 39.950.000

Sebagai catatan, seluruh harga di atas merupakan banderol OTR Jakarta yang diambil dari situs resmi masing-masing pabrikan. Harga bisa berbeda di tiap daerah tergantung pajak dan kebijakan dealer setempat. Maka itu disarankan untuk mengunjungi dealer Honda dan Yamaha terdekat di kota Anda untuk harga lebih pasti. **(lua/dry/dtm)**



KLASEMEN SUPER LEAGUE

PERSIB-BORNEO SALING TEMPEL, TERPELEST, AMBYAR!



PERSAINGAN juara Super League 2025/2026 terus panas menuju dua laga terakhir. Borneo FC enggan melepaskan Persib Bandung begitu saja.

Borneo FC dalam tekanan untuk menang usai Persib membungkam Persija Jakarta kemarin. Bertandang ke Bali United, Senin (11/5/2026) Borneo sempat tertinggal duluan.

Tapi Pesut Etam, dimotori kegemilangan Mariano Peralta dan Nadeo Argawinata, berhasil comeback. Brace Peralta dan satu gol Juan Villa memastikan mereka menang 3-2, dengan Bali sempat dapat gol bunuh diri dari Caxambu. Borneo bisa saja menang lebih besar. Namun dua gol dari Koldo Obieta dan Villa dianulir VAR karena offside.

Kemenangan ini krusial buat Borneo karena menjaga mereka tetap menempel Persib Bandung. Keduanya sama-sama mengoleksi 75 poin, dengan Maung Bandung unggul head to head. Persib hanya perlu konsisten untuk tidak kehilangan poin di dua laga sisa

guna menyegel juara dan menciptakan hattrick juara Liga Super. Sedangkan Borneo berharap Persib terpeleset sekali, dan Pesut Etam mengais poin absolut, maka puncak klasemen dipastikan beralih. Maka, dua laga pamungkas benar-benar mendebarakan.

"Sepertinya duel penentuan juara akan berlangsung hingga pekan ke-34, laga terakhir musim ini. Tren Persib dan Borneo selalu positif. Bila dua-duanya terus menanggung kemebnangan, Persib-lah juaranya di akhir musim. Meski kelak poinnya sama, Persib unggul head to head pertemuan dengan Borneo," ujar Muhammad Kusnaeni, pengamat sepakbola. Di zona merah, persaingan juga masih ketat. Kekalahan Madura United menjaga Persis Solo tetap punya harapan selamat.

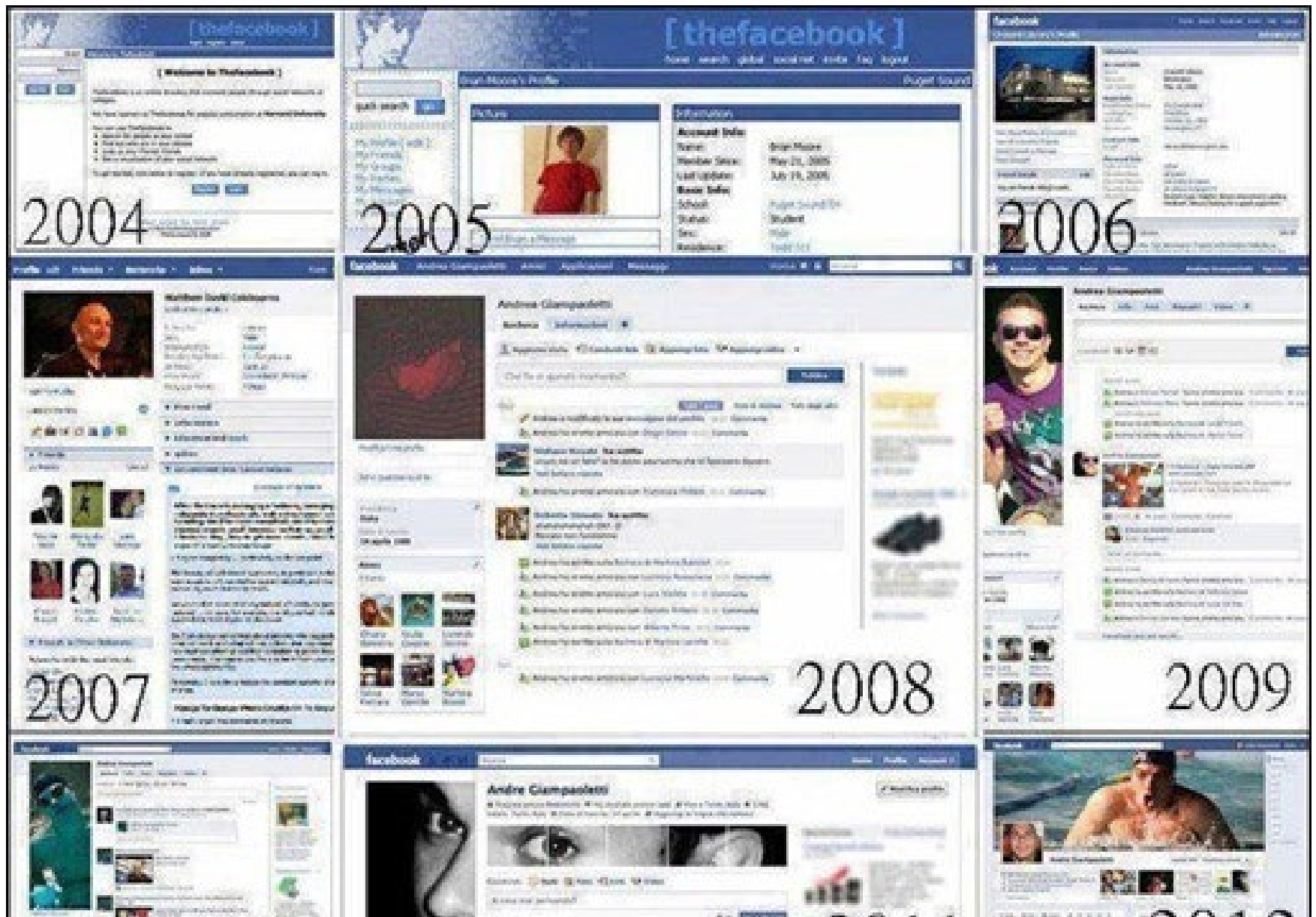
Madura di posisi 15 dengan 32 poin, empat poin di atas Persis. Mereka punya dua laga tersisa untuk saling sikut. Sementara Semen Padang yang punya 20 poin di peringkat 17 masih bisa disalip PSBS Biak Numfor yang punya poin 18 di daar klasemen. Kendati begitu, dua klub ini sudah pasti degradasi ke Liga 2 Divisi Championship) musim depan. Semen Padang tak mungkin bisa mengejar poin 28 Persis Solo di peringkat 16.(raw/dts)

POSISI KLUB M M S K G K +/- POIN

- 1 PERSIB BANDUNG 32 23 6 3 57 21 36 75
- 2 BORNEO SAMARINDA 32 24 3 5 67 30 37 75
- 3 PERSIJA JAKARTA 32 20 5 7 59 28 31 65
- 4 DEWA UNITED FC 32 16 5 11 44 35 9 53
- 5 PERSEBAYA SURABAYA 32 14 10 8 49 35 14 52
- 6 MALUT UNITED 32 15 7 10 66 45 21 52
- 7 BHAYANGKARA FC 32 15 5 12 45 41 4 50
- 8 BALI UNITED FC 32 12 9 11 52 47 5 45
- 9 PERSITA 32 13 5 14 36 33 3 44
- 10 AREMA 32 11 9 12 45 44 1 42
- 11 PSIM YOGYAKARTA 32 10 12 10 40 40 0 42
- 12 PERSIK 32 11 6 15 41 53 -12 39
- 13 PERSIJAP JEPARA 32 9 7 16 31 45 -14 34
- 14 PSM MAKASSAR 32 8 10 14 38 45 -7 34
- 15 MADURA UNITED 32 8 8 16 34 52 -18 32
- 16 PERSIS SOLO 32 6 10 16 35 58 -23 28
- 17 SEMEN PADANG 32 5 5 22 22 55 -33 20
- 18 PSBS BIAK NUMFOR 32 4 6 22 29 83 -54 18



Facebook Mulai Ditinggalkan, Kini Masuk Era Zombie



SEGERA setelah diluncurkan pada tahun 2004, tidak ada hal lain di internet yang lebih keren dibandingkan Facebook. Awalnya platform ini hanya tersedia untuk mahasiswa Harvard, lalu secara bertahap diperluas ke mahasiswa di kampus elit lainnya.

Pada saat akhirnya dibuka untuk publik tahun 2006, antusiasmenya sangat terasa, membuka jalan menuju penawaran saham perdana (IPO) yang fenomenal pada tahun 2012. Sejak masa-masa keemasan itu, perjalanannya tak pernah sama lagi. Tentu saja, mereka berhasil mempertahankan pangsa pasar dengan serangkaian akuisisi terhadap calon-calon pesaing seperti Instagram dan WhatsApp. Namun belakangan disinyalir, semakin banyak yang meninggalkan platform Facebook.

Menjelang tahun 2026, setelah gagalnya transisi

ke Metaverse, menggulir Facebook terasa seperti melihat linimasa tak berujung berisi konten AI, iklan, dan misinformasi murahan. Tak satu pun dari hal-hal tersebut tampaknya dibersihkan oleh pihak perusahaan. Sebagian pihak pun mulai bertanya-tanya apakah perusahaan raksasa ini telah memasuki masa kemunduran panjang yang pada akhirnya pernah membunuh mantan bintang-bintang web lainnya seperti Yahoo dan AOL. Itulah argumen yang dikemukakan oleh jurnalis investigasi ternama Julia Angwin di New York Times.

Pendapatan Meta mulai memperlihatkan tekanan akibat meningkatnya ketidakpuasan konsumen selama bertahun-tahun dan pengeluaran yang sembrono. Laporan pendapatan terbaru mengungkapkan penurunan jumlah pengguna untuk pertama kali sejak mereka mulai melaporkan angka-angka tersebut. "Dan harga saham yang anjlok mengonfirmasi apa yang selama ini kita yakini dalam hati: Ini adalah perusahaan yang sedang memasuki era zombie," tulisnya.

Perusahaan-perusahaan seperti AOL dan

Yahoo secara teknis masih ada di sekitar kita. Anda bisa mengunjungi situs web mereka. Mereka memiliki pelanggan. Mereka bahkan mungkin masih meraup untung, dengan cara memangkas jumlah karyawan dan memonetisasi sisa-sisa traffic terakhir mereka.

"Namun mereka, seperti kata anak-anak zaman sekarang, berada di tingkat sangat memalukan. Banyak remaja akan merasa lebih baik mati daripada ketahuan memiliki akun AOL, alamat email Yahoo atau profil Facebook," cetusnya, dari Futurism. Jika argumen ini terjadi, Zuckerberg mungkin menderita. Dia pernah mencicipi masa-masa keemasan tepat setelah ia drop out dari Harvard dan pernah menjadi pemimpin dari sesuatu yang benar-benar keren.

Zuckerberg masih terus berusaha. Semenjak transisinya ke VR gagal, ia seperti membakar uang demi mencoba membangun dominasi di ranah AI yang sedang memanas tetapi sejauh ini, upayanya masih tertinggal jauh di belakang para pesaing. Namun demikian, Zuckerberg mungkin masih menyimpan beberapa kejutan.

(fyk/dth)

MBG, Gagasan Besar yang Mati-matian Diselamatkan, Implementasi Morat-marit

Dalam politik, tidak banyak gagasan yang mampu bertahan melintasi waktu. Lebih sedikit lagi gagasan yang tetap hidup setelah melewati pergantian rezim, perubahan generasi, bahkan transformasi struktur ekonomi.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya, banyak orang melihatnya bukan semata sebagai produk kampanye elektoral, melainkan sebagai kelanjutan dari sebuah ide lama yang telah lama bersemayam dalam horizon pemikirannya.

Sebagian kalangan masih mengingat istilah "Revolusi Putih", sebuah gagasan yang

pernah dikaitkan dengan Prabowo pada pertengahan 1990-an ketika menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Inti gagasan itu sederhana, tetapi fundamental: bangsa yang besar membutuhkan generasi yang sehat, dan kesehatan generasi dimulai dari kecukupan gizi anak-anaknya. Susu, protein, dan makanan bergizi diposisikan bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan agenda strategis kebangsaan.

Jika ditarik dalam garis sejarah yang panjang, maka MBG dapat dipahami sebagai aktualisasi politik dari ide yang telah menunggu momentum selama hampir tiga dekade. Dari sudut pandang kepemimpinan, ini menunjukkan konsistensi. Dari sudut pandang kebijakan publik, ini menunjukkan bahwa negara sedang berupaya mengintervensi salah satu persoalan struktural Indonesia: kualitas sumber daya manusia. Sulit mencari alasan untuk menolak tujuan mulia ini. Indonesia masih menghadapi persoalan stunting, ketimpangan akses pangan berkualitas, anemia pada remaja putri, hingga disparitas kualitas kesehatan anak antarwilayah. Intervensi gizi memang bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Karena itu, secara konseptual, MBG adalah kebijakan yang benar.

Namun sejarah kebijakan publik di seluruh dunia mengajarkan satu hal penting: kebijakan yang benar belum tentu menghasilkan dampak yang benar apabila implementasinya keliru. Di titik inilah diskusi tentang MBG harus ditempatkan-bukan pada perdebatan ideologis apakah program ini baik atau buruk, melainkan pada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah desain implementasinya sudah tepat?

Implementasi Adalah Jantung Kebijakan

Dalam studi klasik tentang implementasi kebijakan, Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky melalui karya *Implementation* menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan publik umumnya tidak terjadi pada tahap formulasi, melainkan pada tahap implementasi. Banyak kebijakan gagal bukan karena tujuannya salah, tetapi karena sistem pengantarnya tidak bekerja. Pesan serupa diperkuat oleh Michael Lipsky melalui konsep *street-level bureaucracy*: pada akhirnya, kualitas kebijakan ditentukan oleh bagaimana kebijakan itu dijalankan di lapangan-oleh petugas, oleh operator, oleh institusi pelaksana, oleh logistik, oleh kapasitas organisasi.

Rakyat tidak merasakan pidato presiden. Rakyat merasakan makanan yang datang



tepat waktu atau terlambat. Rakyat merasakan apakah makanan itu layak konsumsi atau tidak. Rakyat merasakan apakah program itu memberdayakan komunitas atau justru meminggirkan mereka. Dengan kerangka itu, MBG layak diapresiasi sebagai ide besar, tetapi juga layak dikritisi secara serius pada level implementasi.

Ketika Fiskal Menjadi Titik Tekan

Persoalan pertama adalah soal skala fiskal. MBG bukan program kecil. Dalam proyeksi penuh, kebutuhan anggaran program ini diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Dalam perspektif ekonomi politik, angka ini bukan sekadar besar; ia adalah angka yang berpotensi mengubah struktur prioritas belanja negara. Dalam konteks Indonesia, Rp300 triliun adalah angka yang dapat menyaingi total belanja banyak kementerian strategis. Ia setara dengan sebagian besar ruang fiskal yang selama ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur, subsidi sosial, atau peningkatan kualitas pendidikan.

Tentu negara berhak berinvestasi pada gizi. Tetapi pertanyaan kebijakannya bukan apakah investasi ini penting. Pertanyaannya adalah: apakah investasi sebesar itu sudah didesain secara maksimal, atau setidaknya optimal, dan bukan malah minimal? Dalam ilmu keuangan publik, setiap rupiah memiliki opportunity cost. Ketika negara mengalokasikan Rp300 triliun pada satu program, maka ruang fiskal untuk program lain otomatis menyempit.

Di sinilah desain implementasi menjadi sangat menentukan. Program besar hanya dapat dibenarkan apabila desain operasionalnya benar-benar efisien. Masalahnya, sejumlah desain operasional MBG justru menimbulkan pertanyaan.

Skala yang Terlalu Besar

Salah satu desain yang menarik perhatian adalah model dapur sentral yang melayani hingga sekitar 30 sekolah. Dari perspektif manajemen industri, skala besar sering dianggap efisien. Semakin besar volume produksi, semakin rendah biaya rata-rata.

Namun kebijakan publik tidak selalu identik dengan logika korporasi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, skala yang terlalu besar justru dapat menciptakan eksklusivitas. Dapur yang melayani 30 sekolah membutuhkan modal investasi yang besar, bangunan produksi yang luas, peralatan industri, kendaraan distribusi, sistem rantai pasok, modal kerja yang tinggi. Pertanyaannya sederhana: siapa yang mampu memenuhi syarat seperti itu? Bukan ibu-ibu PKK. Bukan koperasi desa. Bukan usaha mikro. Bukan kelompok perempuan perdesaan. Yang mampu adalah pelaku usaha menengah dan besar, yang sebagian besar berbasis di kota.

Artinya, program yang semestinya menggerakkan ekonomi akar rumput justru berpotensi terkonsentrasi pada kelompok ekonomi yang telah mapan. Ini paradoks

kebijakan.

Padahal jika skala layanan diperkecil-misalnya lima sekolah per dapur-maka investasi menjadi jauh lebih masuk akal bagi komunitas lokal. Koperasi desa bisa masuk. BUMDes bisa masuk. Kelompok usaha perempuan bisa masuk. Bahkan kantin sekolah pun dapat menjadi bagian dari ekosistem.

Di sinilah teori Elinor Ostrom dalam *Governing the Commons* (1990) menjadi relevan. Ostrom adalah ahli politik dari Indiana University, Amerika Serikat penerima Penghargaan Nobel untuk bidang Ekonomi tahun 2009 bersama-sama dengan Oliver E. Williamson untuk analisis ekonomi mereka berkaitan dengan pemerintahan dan sistem kepemilikan kolektif. Ostrom menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya publik sering kali lebih efektif ketika didekatkan kepada komunitas lokal yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilannya. MBG seharusnya bukan sekadar program makan. MBG semestinya menjadi platform ekonomi komunitas.

Logistik Tidak Bisa Dikalahkan oleh Narasi

Persoalan kedua adalah logistik. Makanan adalah komoditas yang sangat berbeda dari bantuan tunai, bantuan sosial, atau transfer fiskal. Makanan memiliki umur konsumsi yang pendek. Ia memiliki standar higienitas, suhu, dan kualitas yang terus menurun seiring waktu. Ketika satu dapur harus melayani hingga 30 sekolah, konsekuensinya sederhana: proses memasak harus dimulai jauh sebelum matahari terbit. Dalam banyak skenario, produksi harus dimulai pukul dua atau empat dini hari. Setelah itu makanan masih harus melalui proses pengemasan, pemuatan, distribusi, perjalanan, penyerahan, hingga akhirnya sampai ke tangan siswa.

Di banyak wilayah Indonesia-dengan kondisi jalan, kepadatan, cuaca, dan akses geografis yang tidak selalu ideal-rantai distribusi ini dapat memakan waktu dua hingga tiga jam. Masalahnya, logistik memiliki hukum yang tidak bisa dikalahkan oleh optimisme politik. Semakin lama makanan berada di luar titik produksi, semakin tinggi risiko penurunan kualitas. Semakin panjang distribusi, semakin besar risiko keterlambatan. Semakin besar volume, semakin sulit pengawasan. Dalam ilmu operasi, kompleksitas meningkat secara eksponensial, bukan linear. Karena itu, desain yang terlalu tersentralisasi justru berpotensi menghasilkan inefisiensi, pemborosan, bahkan risiko keamanan pangan.

Universalisme yang Tidak Selalu Tepat

Persoalan berikutnya adalah soal sasaran. MBG dirancang dengan semangat universalisme-semua anak memperoleh hak yang sama. Secara politik, ini menarik. Secara moral, ini tampak egaliter. Namun dari sudut pandang ekonomi kebijakan, universalisme tidak selalu identik dengan efektivitas. Di banyak sekolah perkotaan, terutama pada

kelompok sosial ekonomi menengah atas, tidak sedikit orang tua yang lebih memilih menyiapkan makanan dari rumah. Bukan karena menolak program negara, melainkan karena mereka memiliki standar keamanan, preferensi nutrisi, atau kebiasaan konsumsi keluarga sendiri.

Dalam situasi seperti ini, risiko makanan tidak dikonsumsi menjadi nyata. Jika makanan diproduksi, didistribusikan, dibiayai negara, tetapi akhirnya dibuang, maka negara sedang membiayai deadweight loss. Padahal, jika sasaran difokuskan pada kelompok miskin, rentan, daerah stunting tinggi, wilayah tertinggal, atau kuintil pendapatan bawah, maka dampak sosial yang sama dapat dicapai dengan biaya yang jauh lebih efisien. Inilah yang dalam teori kebijakan sosial disebut *targeted universalism*: tujuan universal, tetapi intervensi disesuaikan dengan kebutuhan riil.

Dari Program Negara Menjadi Gerakan Sosial

Barangkali kritik paling mendasar terhadap MBG bukan soal anggaran, logistik, atau targeting. Melainkan soal siapa yang menjadi pelaku utama. Saat ini MBG masih sangat berkarakter *state-driven*-negara merancang, negara membiayai, negara mengendalikan. Padahal keberlanjutan program sosial justru lahir ketika masyarakat menjadi *co-producer*. Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa, yaitu PKK, koperasi, BUMDes, kelompok wanita perdesaan/perkotaan, UMKM pangan, kantin sekolah, komunitas ibu rumah tangga.

Bayangkan jika MBG dijalankan berbasis kelurahan dan desa. Bahan baku dibeli dari petani lokal. Telur dari peternak lokal. Sayur dari kelompok tani lokal. Pengolahan oleh kelompok perempuan lokal. Distribusi radius satu kilometer. Maka setiap rupiah APBN tidak berhenti pada konsumsi. Ia berputar menjadi pendapatan rumah tangga. Ia menjadi pemberdayaan. Ia menjadi ekonomi lokal. Ia menjadi *community wealth building*. Di titik itu, MBG berubah dari sekadar program presiden menjadi gerakan sosial.

Menyelamatkan Ide Besar

MBG terlalu penting untuk gagal. Ia menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Ia menyangkut kredibilitas negara. Ia menyangkut warisan pemerintahan. Karena itu, kritik terhadap MBG bukanlah kritik terhadap niat baik. Sebaliknya, kritik adalah upaya menyelamatkan ide besar dari jebakan implementasi. Jika "Revolusi Putih" benar-benar menjadi inspirasi historis di balik MBG, maka revolusi itu tidak cukup diwujudkan melalui anggaran besar dan skala nasional. Revolusi sejati terjadi ketika kebijakan mampu bekerja secara presisi, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Dan seperti yang lama diajarkan dalam studi implementasi kebijakan: yang mengubah bangsa bukan ide besar semata, melainkan kemampuan menghadirkan ide besar itu secara benar di lapangan. **(acd/dth/opr)**



Dari Jakarta Hingga Danau Tondano, Ikan Sapu-sapu yang Sulit Sekali Diberantas

WARGA berkerumun di tepian Sungai Ciliwung yang dipenuhi sampah, menyaksikan para petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melemparkan jala ke air berwarna cokelat setinggi leher.

Beberapa saat kemudian, jala yang terisi penuh diangkat dari air, disambut sorak-sorai puluhan warga sekitar. Hanya dalam dua jam pada Kamis (30/4) pagi itu, petugas berhasil menjala lebih dari 200 ikan. Kesemuanya adalah ikan suckermouth alias sapu-sapu, atau disebut juga "janitor fish" di beberapa tempat di Asia Tenggara. Ikan pemakan dasar yang termasuk dalam genus *Pterygoplichthys* ini berasal dari perairan tropis Amerika Selatan, di belahan bumi lainnya.

Kini ikan ini telah mendominasi - bahkan terkadang satu-satunya spesies - di hampir seluruh sungai, danau, waduk, dan kanal

Jakarta yang tercemar. Keberadaan mereka telah secara tajam mengurangi populasi ikan-ikan lokal seperti baung merah, wader, atau gabus.

"Warga di sini pertama kali menyadari keberadaan sapu-sapu pada tahun 1980-an," kata Baharuddin, 69, warga setempat, kepada CNA. "Dulu, mudah menemukan jenis ikan lain. Tapi sekarang, bagian sungai ini 100 persen sapu-sapu."

Invasi ikan spu-sapu sudah tiba di Sulawesi Utara. Danau Tondano sebagai buktinya. Nelayan di sana semakin hari mengeluh berkurangnya tangkapan ikan lokal. Terbanyak yang terjaring adalah ikan sapu-sapu. Akan tetapi pemerintah Sulut dan Pemkab Minahasa belum bereaksi. Tidak tampak gerakan yang berusaha melindungi habitat ikan lokal dari serangan ikan sapu-sapu. Masih dianggap biasa-biasa saja. Padahal sudah banyak nelayan seputar danau menjerit. Ikan khas Danau Tondano, payangka, mujair hitam, ikan mas dan lainnya semakin berkurang.

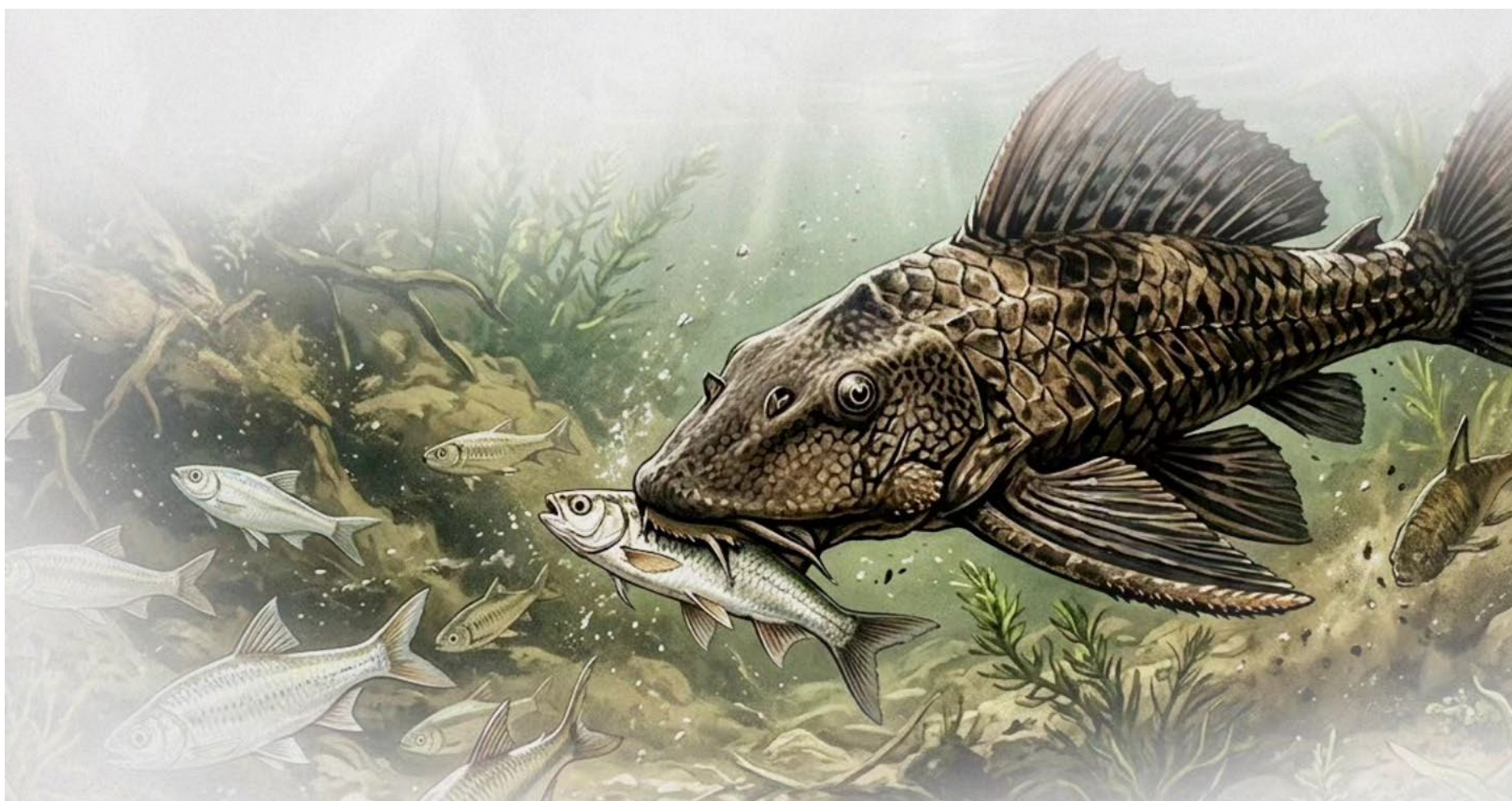
Invasi sapu-sapu tidak hanya menyerbu Jakarta dan perairan Indonesia. Di Filipina,

ikan ini telah menyebar ke berbagai jalur air di sekitar Manila, termasuk Sungai Pasig dan Danau Laguna, membuat spesies lokal terusir dan mengubah ekosistem setempat. Sementara itu di Malaysia, ikan ini telah mendominasi sebagian Sungai Klang serta perairan lain di Kuala Lumpur dan Selangor.

Pada 2024, Departemen Perikanan Malaysia memperkirakan bahwa 80 hingga 90 persen populasi ikan di Lembah Klang didominasi oleh tiga jenis ikan sapu-sapu. Pemerintah setempat memperingatkan bahwa kehidupan akuatik lokal di sana bisa segera menghilang.

Pada awal bulan ini, Direktur Jenderal Departemen Perikanan Adnan Hussain mengatakan, berbagai langkah pengendalian telah ditempuh, tetapi kondisinya sudah "mencapai tingkat kritis", dengan ikan lele sapu-sapu menjadi faktor yang paling merusak.

Makalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2025 menyebutkan bahwa di beberapa wilayah sungai Jakarta yang tercemar, tingkat invasi sapu-sapu mencapai 100 persen. Bahkan, di jalur air





yang lebih bersih di Jawa Barat, tempat 13 sungai di Jakarta bermula, prevalensi ikan ini berkisar antara 20 hingga 30 persen.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan operasi penertiban berskala kota. Sejak 17 April lalu, pasukan oranye berpindah menyusir sejumlah badan air, menangkap sebanyak mungkin ikan sapu-sapu. Dalam sepekan, lebih dari 10 ton spesies invasif ini telah ditangkap dan dimusnahkan. Upaya serupa juga berlangsung di Malaysia, di mana pemerintah setempat dan organisasi nonpemerintah telah menangkap lebih dari 100 ton ikan sapu-sapu sejak 2021.

Perjuangan kedua negara melawan ikan sapu-sapu merupakan gambaran akan masalah yang ditimbulkan spesies invasif asing di seluruh dunia. Kerugian ekonomi global akibat spesies invasif ini melebihi US\$423 miliar per tahun, menurut perkiraan sebuah badan antarpemerintah pada 2023. Menurut laporan Invasive Alien Species dari Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), aktivitas manusia telah membuat lebih dari 37.000 spesies asing ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Selain merugikan spesies lokal dan ekosistem setempat, para ilmuwan menyebut spesies invasif juga dapat menyebabkan kematian, misalnya spesies nyamuk invasif yang menyebarkan penyakit mematikan seperti malaria dan demam berdarah.

Akan sangat sulit memusnahkan spesies asing ini jika mereka sudah menetap, seperti yang terjadi pada kasus ikan sapu-sapu. Para ahli mempertanyakan efektivitas penangkapan massal. Pasalnya, ikan sapu-sapu cepat sekali berkembang biak, bertelur ratusan butir dalam sekali waktu, dan tidak memiliki predator alami di perairan Asia Tenggara. “Mengendalikan ikan sapu-sapu

melalui penangkapan massal ... hanyalah solusi sementara,” kata Mahawan Karuniasa, dosen di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, kepada CNA.

Ia mengatakan, fokus seharusnya dialihkan pada penanganan pencemaran yang telah menghancurkan spesies lokal, serta penerapan langkah yang lebih ketat untuk mencegah masuk dan menyebarnya spesies asing.

DARI AKUARIUM KE ALAM LIAR

Ikan bertubuh bintik dan memiliki lapisan pelindung keras di tubuhnya ini sudah lama populer di kalangan pehobi karena mampu mengikis alga dari kaca akuarium. Dari sinilah ikan itu mendapatkan julukan "sapu-sapu". Permintaan yang tinggi mendorong toko hewan peliharaan di seluruh Asia Tenggara membudidayakannya di penangkaran, sebagian berlokasi dekat dengan badan air.

“Entah mereka lepas saat banjir, praktik biosekuriti yang buruk, atau sengaja dilepaskan oleh pemilik yang sudah tidak menginginkannya. Ikan sapu-sapu kemudian masuk ke sungai dan danau, tempat mereka cepat beradaptasi tanpa menghadapi predator alami,” kata Mahawan. Dengan kemampuan berkembang biak yang cepat, sifat agresif terhadap spesies lain, serta tubuh yang memiliki lapisan seperti tameng yang sulit ditembus predator, ikan sapu-sapu dengan cepat mengungguli spesies akuatik lokal. Ikan ini juga memiliki kemampuan untuk menyerap oksigen langsung dari udara, bukan hanya melalui insang. Hal ini memungkinkannya bertahan hidup di perairan keruh dan tercemar dengan kadar oksigen rendah.

“Dominasi mereka di Asia Tenggara menunjukkan kemampuan adaptasi evolusioner yang luar biasa serta toleransi terhadap tekanan fisikokimia yang ekstrem,”

kata Nur Azalina Suzianti Feisal dari Management and Science University di Selangor kepada CNA.

Azalina, yang memimpin Centre of Climate Resilience and Strategy di universitas tersebut, mengatakan, sifat-sifat ini memungkinkan sapu-sapu berkembang di perairan sungai perkotaan yang berkualitas buruk, tempat kebanyakan ikan lokal tidak dapat bertahan.

Para ahli memperingatkan bahwa spesies ini menjadi ancaman besar terhadap lingkungan. Ikan sapu-sapu menggali tepi dan dasar sungai, mempercepat erosi serta merusak tanaman air dan area pemijahan spesies lain. Sebagai pemakan dasar, mereka juga menelan logam berat dari endapan yang tercemar dalam jumlah besar, sehingga berbahaya bagi manusia dan hewan yang mengonsumsinya.

“Penelitian kami menunjukkan saluran pencernaan mereka menampung konsentrasi logam beracun yang sangat tinggi, khususnya timbal dan arsenik,” kata Azalina.

Kekhawatiran akan kontaminasi telah menghambat penangkapan komersial dan konsumsi ikan ini, berbeda dengan beberapa spesies invasif lain di Asia Tenggara seperti nila — yang berasal dari Afrika dan Timur Tengah — serta ikan red devil cichlid dari Amerika Tengah.

Bahkan di perairan yang kurang tercemar, warga juga enggan memakan ikan sapu-sapu. “Orang di sini menganggap sapu-sapu beracun. Kalau tertangkap, biasanya langsung dibuang,” kata Arief Kamarudin, 35, warga Jakarta, seraya menambahkan bahwa bagian luarnya yang keras juga membuat ikan sapu-sapu sulit diolah. “Jika tidak hati-hati tangan bisa terluka. Dengan kesulitan mengolahnya, ditambah dagingnya yang sedikit, warga lebih memilih tidak memakannya - bahkan saat ini, ketika ikan jenis lain sulit ditemukan.”

WARGA BERUSAHA MEMBERANTAS

Namun, rendahnya nilai ekonomi dari ikan sapu-sapu tidak menyurutkan sebagian orang untuk mengambil langkah mandiri.

Pada 2022, sekelompok warga Malaysia membentuk Skwad Pemburu Ikan Asing (SPIA) dengan tujuan membersihkan perairan Lembah Klang dari spesies ikan hias invasif seperti sapu-sapu, peacock bass, dan lele Afrika.

Hampir setiap hari, puluhan relawan menyebar ke seluruh wilayah, mendatangi sungai dan kanal untuk menangkap hingga setengah ton ikan bandaraya — sebutan untuk ikan sapu-sapu di Malaysia. “Harapan saya, semua orang, bukan hanya pemilik ikan hias, ikut menjaga ekosistem kita,” kata pendiri SPIA Mohamad Haziq A Rahman kepada CNA saat kegiatan penangkapan di Puchong, Selangor, Selasa (28/4). “Jangan melepaskan ikan (invasif) ini, karena



dampaknya spesies lokal kita bisa punah.”

Sekitar 20 orang mengikuti kegiatan tersebut, menyisir anak Sungai Klang untuk mencari spesies invasif. Pada akhir kegiatan, mereka berhasil mengangkat sekitar 2.500kg ikan bandaraya dari lokasi tersebut. Haziq mengatakan, SPIA kerap bekerja sama dengan pemerintah daerah, universitas, dan perusahaan dalam program tanggung jawab sosial. Misalnya dalam program kolaborasi dengan Dewan Kota Kuala Langat pada 28 April lalu, para peserta mendapatkan RM1 (Rp4.300) untuk setiap kilogram ikan sapu-sapu yang mereka tangkap.

Namun, masih banyak yang perlu dilakukan karena operasi penangkapan ini membutuhkan dana dan peralatan yang besar, termasuk perahu dan truk. “Faktor utama adalah tenaga manusia. Jika lebih banyak orang terlibat, itu sudah sangat membantu kami,” ujarnya.

Di Jakarta, Arief telah mengedukasi publik tentang bahaya ikan sapu-sapu bagi lingkungan melalui TikTok sejak 2019. Ia memiliki lebih dari 380.000 pengikut. “Banyak orang tidak tahu bahwa sapu-sapu itu invasif. Banyak juga yang tidak tahu bahwa ikan ini bukan berasal dari Jakarta,” kata Arief, yang tinggal di bantaran Ciliwung, sungai terbesar di Jakarta.

“Banyak orang juga tidak tahu bahwa sapu-sapu mengancam spesies lokal dan harus diberantas dari danau serta sungai di Jakarta.”

Arief secara rutin membuat video pendek saat berada di atas perahu karet, melempar jala ke Sungai Ciliwung, untuk menunjukkan cara menangkap dan membuang ikan invasif tersebut serta menemukan lokasi sarangnya.

“Rekor pribadi saya 70 ekor sapu-sapu dalam satu kali tebar jala,” ujarnya. Sementara itu, sejumlah universitas dan organisasi berbasis komunitas mengumpulkan ikan lokal dari Sungai Ciliwung untuk diselamatkan dan dikembangkan secara ex situ, dengan harapan suatu hari dapat dilepasliarkan kembali ke alam. Upaya-upaya ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan di tingkat pemerintah Jakarta. Menanggapi kekhawatiran warga atas penyebaran ikan sapu-sapu di lingkungan mereka, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan perburuan secara besar-besaran di seluruh kota. Gubernur belum menetapkan jangka waktu maupun target program tersebut, dan menyatakan bahwa upaya ini akan berlangsung selama masih diperlukan. Petugas di Jakarta menjala ikan sapu-sapu, spesies invasif yang berasal dari Amerika Selatan.

POPULASI CEPAT PULIH

Meski pemerintah kota dan para relawan telah berhasil mengangkat berton-ton ikan

sapu-sapu, para ahli menilai upaya tersebut kerap bersifat lokal dan sementara. “Populasi cenderung cepat pulih. Saat ini, bukti penurunan populasi yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem masih terbatas, meskipun perbaikan lokal dapat terjadi setelah penangkapan intensif,” kata Azalina dari Management and Science University di Selangor. Peneliti tersebut mendorong lembaga pengelola lingkungan di kawasan untuk memprioritaskan program pemusnahan terarah terhadap ikan sapu-sapu. “Pada saat yang sama, ada kebutuhan mendesak akan kampanye kesehatan publik yang ketat untuk mencegah komunitas rentan mengonsumsi ikan ini, disertai pengawasan regulasi yang

Para ahli menegaskan bahwa pencemaran harus terlebih dahulu dikendalikan di sungai-sungai Asia Tenggara, yang sebagian di antaranya telah menjadi sangat beracun. “Barulah kita dapat dengan aman membuang bangkai sapu-sapu atau mengolahnya menjadi produk bernilai komersial tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia maupun lingkungan,” kata Mahawan. ‘Ledakannya seperti bom’: Harap-harap cemas warnai upaya legalisasi 30 ribu sumur minyak rakyat la menambahkan, Indonesia juga harus memperketat langkah biosekuriti dengan mengendalikan impor dan penjualan spesies asing yang berpotensi membahayakan spesies endemik.



lebih kuat serta edukasi publik guna menghentikan pelepasan ikan hias ke perairan tawar,” tambahnya.

Di Indonesia, unsur kekejaman menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap praktik Pemerintah DKI Jakarta yang mengubur ikan sapu-sapu hidup-hidup. Sejak itu, pejabat kota berjanji bahwa semua ikan akan dipastikan mati sebelum dikuburkan. Sejumlah pihak mengusulkan pemanfaatan ikan sapu-sapu menjadi kompos atau pakan ternak, seperti yang dilakukan di Thailand, atau dijadikan arang seperti di Brasil.

Namun, Yusli Wardiatno, profesor bidang kelautan dan perikanan di Institut Pertanian Bogor (IPB), menolak usulan tersebut. “Risiko kesehatan tetap ada meskipun ikan diolah menjadi produk nonpangan seperti pakan, pupuk, atau bahan industri. Logam berat berpotensi kembali masuk ke rantai makanan atau diserap tanaman melalui pupuk jika proses pengolahannya tidak benar-benar bersih,” ujarnya, seperti dikutip dari situs IPB.

Langkah ini telah diterapkan di Australia dalam menangani katak tebu (cane toad), yang berubah menjadi hama setelah pertama kali diperkenalkan di Queensland pada 1935 untuk melindungi perkebunan tebu dari kumbang.

Amfibi beracun tersebut kemudian menyebar ke tiga negara bagian lain di Australia dan dikaitkan dengan penurunan hingga kepunahan sejumlah spesies lokal.

Mahawan mengatakan, negara-negara harus memantau seluruh hewan dan tumbuhan asing yang berpotensi mengancam spesies asli. “Jika (spesies asing) dilepas ke alam liar, baik sengaja maupun tidak, deteksi dini dan respons cepat sangat krusial,” ujarnya.

“Langkah harus segera diambil untuk menghentikan (spesies asing) berkembang biak, menyebar, dan pada akhirnya mendominasi ekosistem lokal. Jika itu terjadi, waktu, biaya, dan upaya yang dibutuhkan untuk memulihkan kerusakan bisa jauh lebih besar.” (dar/tar/dth)



KIBARKAN BENDERA PALESTINA, NETIZEN ISRAEL MURKA KE YAMAL, DISUMPAHIN: SEMOGA KAKINYA PATAH



LAMINE Yamal mengibarkan bendera Palestina dalam parade juara Barcelona. Netizen Israel geram dan menyumpahahi sang winger cedera parah.

Barcelona menggelar parade juara LaLiga dan Piala Super Spanyol mengelilingi kota pada Senin (11/5) waktu setempat. Di atas bus atap terbuka, Lamine Yamal kemudian terlihat mengibarkan bendera Palestina. Momen itu bikin banyak netizen Israel geram. Seperti dibagikan jurnalis Palestina, Abubaker Abed, banyak yang mengutuk aksi Yamal.

Fans Israel itu memenuhi pemberitaan Yamal mengibarkan bendera Palestina dengan komentar sumpah serapah. Banyak yang berharap bintang berusia 18 tahun itu cedera patah kaki! Media-media Israel juga menyuarakan kekecewaannya pada Lamine Yamal. Banyak yang tak senang pemain muda Barcelona mengibarkan bendera Palestina dalam parade juara tersebut.

"Musim ini anda akan melihat dia mendapat cedera yang membuatnya absen panjang, seperti patah kaki atau cedera kepala," sindir netizen Israel. "Saya harap si bodoh ini patah kaki," komentar netizen Israel lainnya. "Saya tak mendukung klub mana pun. Jika saya mendukung Barcelona setelah insiden ini, saya akan berhenti. Tak ada pemain Barcelona yang menghentikannya (Yamal). Ini menjijikkan," timpal netizen lain.

"Menuju akhir kariernya," sindir netizen lain. Barcelona menyegel gelar juara LaLiga usai menangi El Clasico kontra Real Madrid, Minggu (10/5) waktu setempat. Tiga poin membuat Lamine Yamal dkk unggul 14 angka dari Los Blancos dengan menyisakan tiga pertandingan lagi. Kendati disumpahahi netizen Israel hingga menggeruduk akun medsosnya, pemain keturunan Maroko-Guinea itu cuek. Ia hanya membalas dengan emoticon tertawa dan tak kendur semangat membela kemerdekaan Palestina. Winger timnas Spanyol yang juara Eropa saat berusia 16 tahun dan 6 bulan, tidak peduli dengan protes netizen Yahudi. Sebagai seorang muslin, Yamal pernah mengatakan, ia memiliki tanggungjawab untuk menyuarakan Palestina dengan caranya sendiri. "Saya tidak

melihat di Palestina beragama Islam. Faktanya, orang Palestina banyak yang beragama Kristen dan mereka pun korban zionisme. Saya bukan politisi, hanya pemain sepakbola. Sejauh tangan masih bergerak dan kaki terus melangkah, di mana-pun saya akan terus menentang genosida di Gaza. Ini bukan soal Islam, ini soal kemanusiaan. Dan di sana terjadi pembunuhan terhadap warga sipil tak berdosa. Itulah kita manusia, kadang suara saya dianggap sebagai anak di bawah umur. Anda lupa, saya bermain dengan lawan dan kawan orang-orang dewasa di Spanyol dan mereka mendukung saya. Semoga mereka(Palestina) mendapat keadilan," seru Yamal dalam akun resmi Barcelona FC.

Yamal saat ini masih cedera dan arena itu ia tidak bisa menuntaskan musim ini di lapangan. Tetapi ia sudah hadir di Camp Nou saat Barcelona menang di laga El Clasico lawan Madrid. Kakinya yang cedera sudah tidak terpicang lagi, seperti ketika ia kali pertama duduk di tribun pasca cedera engkel. Pemain kelahiran Spanyol 13 Juli 2007 itu diprediksi akan sembuh dan tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko pada Juni-Juli mendatang.(yna/bay/dts)

BERLANGGANAN

MPEOPLE

By: Manadopost.id



Manadopost.id

ONLY
25K /Bln

DISCOUNT 50RB
LANGGANAN
SETAHUN

250K

CONTACT US:

+62 852-5650-8607

+62 813-5633-4490

ALL IN ONE: Pdf Koran Manado Post, Pdf Manado Post
Digital, serta Update Berita Manadopost.id